



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Ruhu Rahayu I. No.8. Kel. Seppingan Baru. Kec. Balikpapan Selatan Telp/Fax. (0542) 4651769  
 Laman : dlh@balikpapan.go.id Web: www.dlh.balikpapan.go.id

Kode Pos 76115

**INDIKATOR KINERJA  
 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**

NO	IKK	NO	URUSAN	RUMUSAN MASALAH	ISIAN	ISIAN DATA	OPD	KET
BAB XV	INDIKATOR KINERJA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) upaten/Kota	IKLH kota = (IKA 30%)+(IKD 30%)+(ITH 40%)		69,66	DLH	Perhitungan data menggunakan Metode perhitungan IKLH 2020-2024 berdasarkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: 5.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 04 Desember 2020
				IKA=Indeks Kualitas Air,	49,44			
				IKD= Indeks Kualitas Udara,	88,52			
				ITH= Indeks Tutupan Hutan	69,49			
		2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kota	total volume sampah yang dapat ditangani	135831,1	74,85	DLH	
				total volume timbunan sampah kota	181479,86		DLH	
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kota	103	100%	DLH	
usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	103			DLH				

Balikpapan, Februari 2022  
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
 Kota Balikpapan,

*(Signature)*  
 Sudirman Djayaleksana



# PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Ruhui Rahayu I, No.8, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan Telp/Fax. (0542) 4651769  
 Laman : dlh@balikpapan.go.id Web: www.dlh.balikpapan.go.id

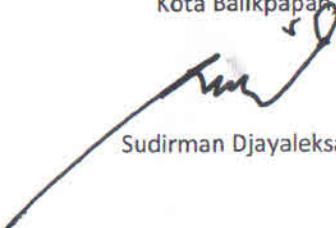
Kode Pos 76115

### INDIKATOR KINERJA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

URUSAN	NO	IKK	NO	INDIKATOR	ISIAN DATA	OPD	KET	
LINGKUNGAN HIDUP	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Hasil perhitungan kota terhadap:					DLH
			1	a. Indeks kualitas air (IKA)	a. Indeks Kualitas Air (IKA)	49,44	DLH	Perhitungan data menggunakan Metode perhitungan IKLH 2020-2024 berdasarkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: 5.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 04 Desember 2020
				b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,52	DLH	
		c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	69,49	DLH			
	2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	2	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	129	DLH	
					2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	ada	DLH	
					3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing-masing lingkungan	1	DLH	
	3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	3	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kot	Persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemkot	37	DLH	Persetujuan lingkungan, Persetujuan Teknis (Pertek) Air Limbah dan Rincian Teknis (Rintek) Limbah B3 dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kota
					Pertek dan Rintek yang diterbitkan oleh pemkot	48	DLH	
					izin PUU LH yang diterbitkan oleh pemkot		DLH	
				jumlah usulan permohonan yang teregistrasi	54	DLH		
			4	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota		jumlah PPLHD yang ada	3	DLH
					jumlah izin kegiatan dan atau usaha yang memiliki persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh PEMDA kota	37	DLH	
					Pertek dan Rintek yang diterbitkan oleh pemkot	48	DLH	
	jumlah izin kegiatan dan atau usaha yang izin PUU LH yang diterbitkan oleh PEMDA kota				DLH			

			5	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota Masyarakat	Jumlah MHA yang diakui		DLH	Masyarakat Hukum Adat adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya,
					jumlah usulan MHA		DLH	
			6	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA Yang mendapatkan pelatihan		DLH	
					jumlah MHA yang ada		DLH	
			7	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana	13	DLH	
					target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat	13	DLH	
			8	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah	pengaduan msyarakat yang ditangani	40	DLH	
					total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	40	DLH	
URUSAN KEHUTANAN	URUSAN KEHUTANAN		9	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan		DLH	TIDAK PERLU DI ISI
			10	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi		DLH	TIDAK PERLU DI ISI
			11	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi		DLH	TIDAK PERLU DI ISI
			12	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun		DLH	TIDAK PERLU DI ISI

Balikpapan, Februari 2022  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Balikpapan

  
Sudirman Djayaleksana